

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Bagaskara Dwi Wahyu Jati. 2022. Implementasi Pembangunan Jamban Sehat Di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi jamban sehat di Kecamatan Musuk menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Grindle yang terdiri atas: isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Jenis penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan semua parameter dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan sudah terimplementasi dengan baik. Namun akibat pandemi Covid-19, parameter seperti pelaksana program yakni kegiatan monitoring dan Implementasi serta parameter sumber daya yang digunakan yakni sumber daya dana menjadi terhambat.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980) yang membedakan dua aspek utama dalam implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

- a. Isi kebijakan mencakup kepentingan kelompok sasaran, manfaat program, serta sumber daya yang disediakan pemerintah.

- b. Konteks implementasi meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi target program.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparat pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat penerima program jamban sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pembangunan jamban sehat di Kecamatan Musuk telah dilaksanakan sesuai pedoman Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah telah memberikan bantuan stimulan berupa bahan bangunan jamban kepada masyarakat kurang mampu. Namun demikian, dari sisi keberlanjutan program, masih terdapat kendala pada aspek kesadaran masyarakat dan faktor ekonomi. Bagaskara menemukan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap buang air besar di sungai adalah hal yang wajar karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Rendahnya tingkat pendidikan juga membuat sebagian warga kurang memahami pentingnya sanitasi. Selain itu, koordinasi antar pelaksana program di tingkat desa masih belum optimal, karena sebagian aparatur desa belum memahami dengan baik mekanisme pelaporan dan evaluasi program jamban sehat. Dalam konteks teori Grindle, aspek "*content of policy*" sudah cukup Optimal karena kebijakan telah dirancang jelas dan ada dukungan sumber daya dari pemerintah. Namun, aspek "*context of implementation*" masih lemah karena kondisi sosial budaya masyarakat belum mendukung perubahan perilaku yang diharapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pembangunan jamban sehat tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan

dan anggaran, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat dan kesadaran mereka terhadap pentingnya sanitasi. Pemerintah perlu memperkuat pendampingan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat agar program tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga perubahan perilaku. Penelitian Bagaskara sangat relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti persoalan implementasi program sanitasi di tingkat desa. Kondisi di Desa Teluk Mesjid juga menunjukkan gejala serupa, masih adanya praktik BABS, keterbatasan sumber daya, serta perlunya peran aktif aparatur desa dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari buang air besar sembarangan.

2. **Gilang Rahman Adri Yunus. 2021. IMPLEMETASI PROGRAM PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TERHADAP PENBANGUNAN JAMBAN SEHAT (Studi di Kota Metro). Skripsi. FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.** Di dalam program STBM ini terdapat 5 pilar STBM antara lain tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman kelima pilar tersebut merupakan satu kesatuan kesatuan. Program STBM mempunyai Tujuan yaitu memfasilitasi masyarakat sehingga dapat mengenali permasalahan kesehatan lingkungannya sendiri, memfasilitasi masyarakat untuk menganalisis masalah kesehatan lingkungan mereka dengan metode pemicuan sehingga meninggalkan kebiasaan buruk mereka, serta

memunculkan kemauan keras masyarakat untuk membuat tempat cuci tangan dirumah masing- masing dan menciptakan lingkungan yang bersih dan higienis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi program pembangunan jamban sehat di Kota Metro telah berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Gilang menggunakan **teori** implementasi kebijakan publik George C. Edwards III (dalam Subarsono, (2023:38-40) yang menekankan empat variabel penting: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pejabat dinas kesehatan, aparatur kelurahan, tenaga sanitarian, serta masyarakat penerima bantuan jamban sehat. Dari hasil penelitiannya, Gilang menemukan bahwa aspek komunikasi antar lembaga pelaksana sudah terjalin baik di awal program, namun tidak berkelanjutan. Sosialisasi kepada masyarakat sering kali hanya dilakukan menjelang penyaluran bantuan, sehingga banyak warga yang belum sepenuhnya memahami tujuan program. Aspek sumber daya juga menjadi kendala utama, terutama karena terbatasnya jumlah tenaga sanitarian dan anggaran bantuan yang tidak sebanding dengan jumlah rumah tangga yang membutuhkan. Dalam aspek disposisi, atau sikap pelaksana, ditemukan bahwa sebagian besar aparat pemerintah memiliki komitmen tinggi terhadap keberhasilan program. Namun, pelaksana di tingkat bawah sering menghadapi dilema antara target capaian dan kondisi riil masyarakat yang

sulit berubah perilakunya. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, Gilang mengidentifikasi bahwa prosedur administrasi yang panjang dan koordinasi antarinstansi yang lemah menyebabkan keterlambatan dalam distribusi bantuan dan laporan capaian. Misalnya, laporan dari puskesmas sering terlambat diproses di tingkat kabupaten karena perbedaan format pelaporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan jamban sehat di Kota Metro belum sepenuhnya efektif. Meskipun sarana fisik telah tersedia, masih banyak masyarakat yang belum menggunakannya secara optimal karena rendahnya kesadaran dan tidak adanya sistem pengawasan yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang konsisten, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang berkomitmen, dan struktur birokrasi yang efisien merupakan empat faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Penelitian Gilang sangat relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan teori George C. Edwards III dan membahas implementasi kebijakan di bidang sanitasi. Kondisi di Desa Teluk Masjid memiliki kesamaan dengan Kota Metro, yaitu keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Penelitian Gilang memberikan dasar teoritis bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 juga sangat bergantung pada efektivitas komunikasi, dukungan sumber daya, dan peran aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai deklarasi resmi pemerintah yang mencerminkan pilihan utama dalam mengatasi berbagai tantangan atau masalah publik. Kebijakan publik ini merupakan respon atas permasalahan yang timbul di masyarakat. Sebuah kebijakan publik yang efektif memiliki ciri-ciri tertentu seperti memiliki kelompok sasaran yang jelas, jangka waktu pelaksanaan yang spesifik, dan alokasi sumber daya yang mendukung realisasi dari kebijakan tersebut.

Setiap kebijakan publik lahir dari kebutuhan nyata. Artinya kebijakan tersebut dirancang sebagai respon atau solusi atas permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh masyarakat.

Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Charles O Jones mengatakan bahwa istilah kebijakan (*polcy term*) digunakan dalam kebiasaan sehari-hari serta bisa digunakan untuk menginterpretasikan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah maupun masyarakat sering menggunakan kata kebijakan dengan peruntukan tujuan yang berbeda; seperti diperuntukan untuk tujuan program, keputusan, standar, proposal, dan *grand design*.

Graycar (M.Husni Tamrin 2023:2) menyebutkan bahwa istilah “kebijakan” atau *policy* dapat dilihat dari empat pandangan berbeda, yaitu filosofi, produk, proses, dan kerangka kerja. Dari sudut pandang filosofis, kebijakan dipahami sebagai kumpulan prinsip atau keadaan yang diharapkan. Dalam konteks produk, kebijakan diinterpretasikan sebagai serangkaian kesimpulan atau saran. Ketika dilihat sebagai proses, kebijakan menunjukkan bagaimana suatu organisasi memahami ekspektasi terhadapnya; termasuk program dan mekanisme untuk mencapai tujuan.

Adapun sebagai kerangka kerja, kebijakan dianggap sebagai serangkaian negosiasi dan tawar-menawar untuk menentukan isu-isu serta cara pelaksanaannya.

Sementara itu, istilah “publik” diartikan sebagai khalayak luas atau masyarakat umum. Menurut Kamus Oxford, kata “*public*” memiliki arti yang berkaitan dengan masyarakat pada umumnya; sesuai yang disediakan khususnya oleh pemerintah untuk digunakan oleh masyarakat luas, bukan milik pribadi. Sesuatu tersebut diketahui oleh banyak orang melalui media seperti koran, televisi, dan sebagainya; serta sesuatu yang terbuka atau diketahui oleh masyarakat umum.

Selain itu banyak pakar mendefinisikan terkait kebijakan publik, dan masing-masing memberikan karakteristik serta perspektif unik dalam memandang kebijakan publik. Apabila disederhanakan, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan guna mencapai perubahan yang diinginkan. Kebijakan publik memberikan panduan bagi masyarakat untuk mengarahkan perubahan.

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Sedangkan menurut Fredrich dalam Siti Marwiyah, (2022:12) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan

kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Siti Marwiyah (2022:12) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Selain itu, Anderson dalam Siti Marwiyah (2022:12) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Abdul Wahab dalam Siti Marwiyah (2022;12), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah satu rangkayan yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

b. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno dalam Siti Marwiyah

(2022: 13), antara lain:

- 1) Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
- 4) Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
- 5) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

c. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson yang dikutip dari Siti Marwiyah (2022:12-

13) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan *substantif* dan kebijakan *procedural*
Kebijakan *substantif* merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan *prosedural* merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.
- 2) Kebijakan *distributive*, kebijakan *regulatori* dan kebijakan *redistributive*
Kebijakan *distributif* merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan *regulatori* merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan *redistributif* merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan,

pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3) Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat
kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn, dalam

Siti Marwiyah (2022:14-15) adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol

itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) . Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Implementasi Kebijakan/Penilaian

Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, implementasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

1. Konsep Implementasi

Implementasi publik diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, lebih sederhana pengertian implementasi publik dalam Kamus Webster dirumuskan sebagai *“to provide means for carrying out; to give practical effect to”* (Menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Implementasi suatu kebijakan publik sangat bergantung pada rumusan kebijakan yang akan disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh 48 bahwa proses implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy”* *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Menyimak pendapat di atas, bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan publik didalamnya mencakup tiga unsur yang saling menunjang, yaitu sumber daya manusia, kemampuan anggaran (*financial*) dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (secara individu atau berkelompok). Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A, tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan transformasi semua keputusan yang dioperasionalkan dalam berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Sabatier (2016) yang dikutip dari Kamal Alamsyah (2016:62) menjelaskan pengertian implementasi publik sebagai berikut; “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut Grindle dalam Kamal Alamsyah (2016:62) bahwa Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Tidak salah jika implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari seluruh proses kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan publik tentu saja setiap negara berbeda. Demikian pula dengan Indonesia ketika mengimplementasikan kebijakan publik, namun pada prinsipnya hampir sama yakni masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, seperti nilai kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik dalam Kamal Alamsyah (2016:63). Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Sebab itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah.

Korelasi dengan pencapaian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, menurut Anderson dalam Kalam Alamsyah (2016:64) bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Senada dengan pendapat Nugroho dalam Kamal Alamsyah (2016:64) bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan

keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.

Efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta implementasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Kamal Alamsyah (2016:66) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan". Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang

dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis.

a. Teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilaksanakan setelah perencanaan sudah dianggap tepat dan bisa dijalankan.

Berikut faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut para ahli:

1) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merindlee S. Grindel dalam Dr Reno Affrian (2023:46-47) dipengaruhi dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup hal-hal berikut:

- a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan,
- d) Kedudukan pembuat kebijakan.
- e) (siapa) pelaksana kebijakan program.
- f) Sumber daya yang dikerahkan

2) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Dr Reno Affrian (2023:33-37), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap
 - (1) Kesukaran-kesukaran teknis.
 - (2) Keberagaman perilaku yang diatur.
 - (3) Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.
 - (4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
 - b) Kemampuan Kebijakan mentruktur Proses implementasi Secara Tepat.
 - (1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
 - (2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
 - (3) Ketepatan alokasi sumber dana
 - (4) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga atau instansi pelaksana
 - (5) Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana
 - (6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan termaktub dalam undang-undang
 - (7) Akses formal pihak-pihak luar
 - c) Variabel-variabel di luar undang-undang memengaruhi implementasi
 - (1) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
 - (2) Dukungan Publik
 - (3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - (4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana
- 3) Teori Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam Dr Reno Affrian (2023:29), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni sebagai berikut.

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b) Sumber Daya
- c) Karakteristik Agen Pelaksana
- d) Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) Parak Pelaksana

- e) Komunikasi Antarorganisasi dan aktivitas Pelaksana
(1) Lingkungan Ekonomi, Sosial & Politik.
- 4) Teori George C. Edwards III

Dalam pandangan Edwards III dalam Dr Reno Affrian (2023:38-40), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran

b) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

d) Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Faktor penghambat implementasi kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, saran-saran dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua karena kurangnya ketetapan intern maupun ektern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut para sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya, dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3) Dukungan

Pelaksana suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Suatu kebijakan publik akan sangat menjadi efektif apabila dilaksanakan dan dapat menjadi dampak positif bagi masyarakat.

Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota dari

masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, sehingga apabila perilaku atau perbuatan masyarakat tidak sesuai dengan keinginan atau tujuan dibuatnya kebijakan tersebut maka suatu kebijakan publik tidak bisa dikatakan efektif.

a. Implemetasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implemetasi Kebijakan Publik

Studi Implemetasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implemetasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam prakteknya Implemetasi kebijakan merupakan suatu proses adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Bahwa Implemetasi kebijakan menyangkut minimal tiga hal yaitu, adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Implemetasi kebijakan secara sederhana Implemetasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Tahjan dalam (Junaidi Karso 2021:29-31), secara etimologis Implementasi dapat dimaksudkan sebagai ‘Suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil’. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata Implemetasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu

kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Hill dan Hupe dalam (Junaidi Karso 2021:29-31) mendefinisikan bahwa 'Implementasi kebijakan merupakan penyelesaian atas dasar suatu keputusan kebijakan, pada umumnya berbentuk undang-undang tetapi juga dapat mengambil bentuk keputusan eksekutif yang penting'.

Menurut Nugroho dalam (Junaidi Karso 2021:29-31), pengertian Implementasi kebijakan adalah 'Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Tidak lebih dan tidak kurang'. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pendapat Nugroho tersebut sejalan dengan pendapat Winarno dalam (Junaidi Karso 2021:29-31) yang mengemukakan bahwa 'Implementasi merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan'. Sedangkan menurut Meter dan Horn dalam Winarno dalam (Junaidi Karso 2021:29-31) 'Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok, kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya'.

Implementasi kebijakan menurut Abidin dalam (Junaidi Karso 2021:29-31) ‘Pelaksanaan keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat,t. Menurut Abidin dalam Junaidi Karso 2021:29-31) bahwa ‘Proses pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan faktor utama internal dan faktor utama eksternal’. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor pendukung. Sementara faktor eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan

Kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan, perlu persiapan proses implementasi kebijakan yang harus mendayagunakan sumber daya, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam Implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.

Sehubungan dengan faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan suatu program, menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (skripsi Monalisa 2017:19-20) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor tersebut adalah:

- 1) Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi Implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan *sosial cultural* serta keterlibatan penerima program.
- 2) Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- 3) Sumberdaya organisasi untuk Implementasi program. Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
- 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi Implementasi suatu program Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya. organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

d. Teori Implementasi Kebijakan

Model Implementasi kebijakan Implementasi menurut George C.Edwards III (2023:38-40) model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut adalah :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana. Komunikasi yang baik mencakup penyampaian informasi (transmisi), kejelasan pesan (*clarity*), dan konsistensi antara perintah dan pelaksanaan di lapangan. Bila pesan kebijakan tidak jelas atau berubah-ubah, pelaksana akan kesulitan memahami dan melaksanakannya dengan benar.

2. Sumberdaya

Faktor sumber daya mencakup kemampuan manusia, dana, sarana, dan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Meskipun isi kebijakan sudah baik, implementasi akan gagal tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Artinya, pelaksana perlu memiliki kompetensi, fasilitas, dan dukungan finansial yang cukup agar kebijakan dapat dijalankan sesuai rencana.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana kebijakan. Pelaksana yang memiliki semangat, pemahaman, dan tanggung jawab tinggi terhadap tujuan kebijakan akan lebih efektif menjalankannya. Namun, bila pelaksana bersikap apatis atau menolak kebijakan, maka implementasi akan terhambat.

4. Birokrasi

Struktur birokrasi menentukan bagaimana kebijakan dijalankan melalui SOP (Standar Operasional Prosedur) dan koordinasi antarunit. Struktur yang terlalu rumit atau tidak terkoordinasi dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya SOP yang jelas dan pembagian wewenang yang tepat, pelaksanaan kebijakan akan berjalan lebih efisien dan terarah.

Model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Mulyadi 2015: 72-73) dan (Kaji 2015: 55) menawarkan 6

(enam) variabel yang membentuk (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*nerformance*). Berikut enam variabel tersebut :

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Karakteristik dan agen pelaksana/implementor.
Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk di dalamnya: kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dan eksekutif serta legislatif, keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan, dsb).
3. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas. Yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapalannya.
4. Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik (apakah sumber daya ekonomi mencakupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung imple. mentasi; dsb.).
6. Disposisi atau sikap para pelaksana (termasuk di dalamnya: pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan: sikap mereka atas kebijakan tersebut; serta intensitas sikap tersebut). Struktur birokrasi pelaksana, yang memiliki karakteristik, norma, dan pola hubungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana memiliki variabel: i) kompetensi dan jumlah staf, ii) rentang dan derajat pengendalian, iii) dukungan politik yang dimiliki, iv) kekuatan organisasi, v) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan vi) keterkaitan dengan pembuat kebijakan. Wujud respons individu pelaksana atau implementor kebijakan menjadi penyebab dari keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Jika evaluator tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda dari sistem nilai yang dimiliki pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. (Kaji, 2015: 54).

Model Implementasi Kebijakan Warwic dalam (Yulianto Kadji, 2015:70-71) mengatakan bahwa: Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Kemampuan Organisasi,
- b) Informasi,
- c) Dukungan, dan

d) pembagian potensi

Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kemampuan organisasi; dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOP" (Standard Operating Procedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- 2) Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
- 3) Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- 4) Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Jan Merse dalam Kaji (2015: 70) mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut:

1. informasi,
2. isi kebijakan,
3. dukungan masyarakat (fisik dan nonfisik), dan
4. pembagian potensi.

Salah satu indikator dalam Implementasi kebijakan menurut Jan Merse adalah kebutuhan akan dukungan masyarakat yang berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program. Penegasan ini menunjukkan bahwa setiap implementasi kebijakan program pembangunan dan kemasyarakatar

tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder.

b. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

a. Definisi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

- 1) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disebut sebagai ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.
- 2) Strategi Nasional Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Program STBM memiliki indikator *outcome* dan *output*. Strategi Nasional STBM memiliki indikator *outcome* STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ditetapkan sebagai salah satu kebijakan nasional berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 untuk mempercepat pencapaian MDGs tujuannya yaitu mengurangi hingga setengah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi tahun 2015. Tahun 2014 Kepmenkes ini diperbaharui dengan Peraturan Menteri 5Masyarakat.

3) Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan program pemerintah dalam hal menciptakan keluarga dan lingkungan yang sehat dengan melakukan lima hal. Adapun kelima pilar tersebut, adalah :

a) Stop Buang Air Besar Sembarang

Suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Perilaku stop buang air besar sembarangan diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat. Saniter merupakan kondisi fasilitas sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan, yaitu :

- 1) Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia; dan
- 2) Dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam rumah atau di luar rumah) yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah.

Standar dan persyaratan kesehatan bangunan jamban terdiri dari :

a) Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap)

Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.

b) Bangunan tengah jamban

Terdapat 2 (dua) bagian bangunan tengah jamban, yaitu:

- 1) Lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan urine) yang saniter dilengkapi oleh konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana (semi saniter), lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus diberi tutup.
- 2) Lantai Jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).

c) Bangunan Bawah

Merupakan bangunan penampungan, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja melalui vektor pembawa penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat 2 (dua) macam bentuk bangunan bawah jamban, yaitu:

- 1) Tangki Septik, adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai penampungan limbah kotoran manusia (tinja dan urine). Bagian padat dari kotoran manusia akan tertinggal dalam tangki septik, sedangkan bagian cairnya akan keluar dari tangki septik dan diresapkan melalui bidang/sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut.
- 2) Cubluk, merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari air tanah, sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara biologis.

b) Cuci Tangan Pakai Sabun

Cuci tangan adalah proses membuang kotoran dan debu secara mekanis dari kulit kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari permukaan kulit dan mengurangi jumlah mikroorganisme sementara.

Cuci tangan merupakan salah satu cara untuk menghindari penyakit yang ditularkan melalui makanan. Kebiasaan mencuci tangan secara teratur perlu dilatih pada anak. Jika sudah terbiasa mencuci tangan sehabis bermain atau ketika akan makan, maka diharapkan kebiasaan tersebut akan terbawa sampai tua.

Cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu pilar dari STBM yang merupakan program pemerintah dan dianggap penting untuk dilaksanakan dilingkungan masyarakat. Dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah makan dapat meminimalisir tertularnya vector penyakit.

1. Pelaksanaan Cuci Tangan Pakai Sabun

Pada dasarnya air untuk cuci tangan hendaknya air yang mengalir. Penggunaan sabun hendaknya mengenai seluruh tangan dan diperlukan waktu agar kontak kulit dan sabun dapat terjadi. Langkah- langkah tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini:

Cara cuci tangan menurut WHO dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- a) Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir, ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut.
- b) Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian
- c) Gosok jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih
- d) Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan
- e) Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian

- f) Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Bersihkan kedua tangan secara bergantian dengan memutar, kemudian diakhiri dengan membalas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir lalu keringkan memakai handuk atau tisu.

Kebiasaan dalam cuci tangan menggunakan air saja tidak dapat melindungi setiap individu dari bakteri dan virus yang terdapat di tangan. Terlebih jika mencuci tangan tidak dibawah air mengalir. Apalagi kebiasaan menggunakan dan berbagi wadah cuci tangan hal itu sama saja saling berbagi kuman dan tetap membiarkan kuman menempel pada tangan. Kebiasaan itu harus ditinggalkan dan dirubah menjadi yang lebih baik dengan standar prosedur melakukan cuci tangan menggunakan sabun (Kemenkes RI, 2014).

Menggunakan sabun saat mencuci tangan diketahui sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit dan penularan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan merupakan agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak tidak langsung maupun kontak langsung (menggunakan permukaan lain seperti handuk dan gelas) (Kemenkes RI, 2013).

2. Manfaat dari mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

manfaatnya yaitu :

- a) Membunuh kuman penyakit yang ada ditangan
- b) Mencegah penularan penyakit

- c) Mencegah terjadinya keracunan makanan karena tangan penjamah telah memegang bahan kimia
 - d) Tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman.
3. Aktivitas yang tepat untuk mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, mencuci tangan memakai sabun sebaiknya dilakukan sebelum dan setelah beraktifitas. Berikut ini adalah waktu yang tepat untuk mencuci tangan memakai sabun:
- a) Sebelum dan sesudah makan.
 - b) Sebelum dan sesudah menyiapkan bahan makanan
 - c) Sebelum dan sesudah mengganti popok
 - d) Setelah buang air besar dan buang air kecil
 - e) Setelah bersin atau batuk
 - f) Sebelum dan setelah menggunakan lensa kontak
 - g) Setelah menyentuh binatang
 - h) Setelah menyentuh sampah
 - i) Sebelum menangani luka
 - j) Setelah memegang benda “umum”

Hand sanitizer adalah produk pembersih tangan dalam bentuk gel yang mengandung zat antiseptik yang digunakan untuk mencuci tangan tanpa harus membilasnya dengan air (Depkes RI, 2008).

Perbandingan efektivitas hand sanitizer dengan mencuci tangan memakai sabun, menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas pemakaian hand sanitizer dan sabun dalam mengurangi jumlah koloni bakteri pada tangan ($p=0.039$),

mencuci tangan memakai sabun dinilai lebih efektif dalam mengurangi jumlah koloni bakteri pada tangan, dan mencuci tangan dengan sabun masih menjadi pilihan utama dalam menjaga *hand hygiene*.

Efektivitas mencuci tangan menggunakan hand sanitizer terhadap penurunan jumlah angka kuman sebesar 60%. Efektivitas mencuci tangan menggunakan sabun cair antiseptic air mengalir terhadap penurunan jumlah angka kuman sebesar 73%.

c) Pengelolaan Air minum dan makanan yang sehat

Salah satu cara lain yang dapat memutus mata rantai penularan penyakit adalah mengelola air minum dan makanan dengan baik dan sehat. Hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum sehari-hari, proses memasak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar. Menurut Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga diwujudkan melalui kegiatan :

- 1) Membudayakan perilaku pengelolaan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan.
- 2) Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

d) Mengelola sampah dengan benar

Sampah adalah barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia. Sampah rumah tangga yang setiap hari dibuang

oleh masyarakat secara sembarangan menjadikan potensi sebagai sarang serangga pembawa penyakit seperti lalat, kecoa dan lain-lain. Pengelolaan sampah dengan benar akan meminimalisir terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan. Tujuan Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah untuk menghindari penyimpanan sampah dalam rumah dengan segera menangani sampah. Pengamanan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Prinsip-prinsip dalam Pengamanan sampah:

- 1) *Reduce* yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan.
 - 2) *Reuse* yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk.
 - 3) *Recycle* yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru.
- e) Mengelola limbah cair rumah tangga dengan benar.

Selain sampah benda padat, rumah tangga juga menghasilkan limbah cair. Limbah cair yang tidak dikelola dengan benar dapat pula menyebabkan berbagai macam penyakit bagi manusia. Selain itu lingkungan akan tampak kumuh dan tidak indah. Sebaiknya pengelolaan limbah cair ini, masyarakat membuat SPAL (saluran

pembuangan air limbah yang memenuhi syarat. diantaranya saluran kedap air dan tertutup, terdapat lubang peresapan limbah.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah tentang Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar sembarangan di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala ataupun hipoteses.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah program pemerintah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diselenggarakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Regulasi ini merupakan revisi atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 852/MenKes/SK/IX/2008 tentang Stretegi Nasional Sanitasi Berbasis Masyaraka (STBM) serta merujuk pada Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 132 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Di lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah disahkan pula Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS).

Dari peraturan tersebut peneliti hanya akan meneliti tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 tentang stop buang air besar sembarangan yang ada di Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk mengkaji lebih dalam penulis menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut Implementasi menurut George C.Edwards III (2023:38-40) Implementasi menurut George C.Edwards III I(2023:38-40) sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Untuk Mempermudah memahami kerangka berpikir, Untuk menjawab Berikut kerangka sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

